



Peran Indonesia Mewujudkan Perdamaian Afganistan: Studi Literatur Pemberdayaan Hak Belajar Perempuan Afganistan Melalui Pemberian Beasiswa

Regan Danish Heryanto^{1*}, M. Rifqi Rabihyadi², Kalila Hijriyati Arlina³, Sitti Thahira Poetry Tanrere⁴, Hazela Ramadhani⁵, Laksmi Saqeena Ridho⁶, Kamila Syafa Khumaira⁷

¹⁻⁷Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email Korespondensi: regandh@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis pendidikan di Afganistan pasca kembalinya kekuasaan Taliban pada 15 Agustus 2021 yang menyebabkan sekitar 2,2 juta remaja putri kehilangan akses sekolah. Sebagai negara Muslim demokratis, Indonesia berkomitmen memperjuangkan hak belajar perempuan Afganistan melalui diplomasi pendidikan yang berlandaskan pada mandat konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi program beasiswa oleh pemerintah Indonesia sebagai instrumen soft power diplomacy. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan strategi diplomasi yang terintegrasi melalui pemberian beasiswa berjenjang seperti Beasiswa KNB, TIAS, serta kuota khusus di UII, UNEJ, dan UMY, fasilitasi dialog keagamaan melalui jaringan Nahdlatul Ulama, serta mediasi di forum multilateral seperti OKI. Pendekatan ini menggunakan nilai Islam Rahmatan lil-Alamin, konsep Islam Wasathiyah, dan paradigma Maqasid al-Shari'ah khususnya Hifdz al-Aql untuk merekonstruksi argumen bahwa pendidikan perempuan adalah kewajiban teologis yang inklusif. Penelitian menyimpulkan bahwa program beasiswa ini merupakan instrumen soft power yang efektif karena mampu melakukan persuasi melalui kesamaan identitas keagamaan dibandingkan tekanan eksternal konvensional. Meskipun memberikan dampak nyata pada level individu, pengaruhnya terhadap perubahan kebijakan struktural di Afganistan bersifat jangka panjang karena adanya hambatan regulasi domestik rezim Taliban. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya diplomasi berbasis nilai keagamaan moderat sebagai pendekatan alternatif yang lebih efektif dibanding tekanan konvensional, sekaligus mendorong perlunya perluasan program beasiswa yang turut memperhatikan keberlanjutan dan keamanan para lulusan saat kembali ke wilayah konflik.

Kata Kunci: *Beasiswa; Islam rahmatan lil'alam; Soft power diplomacy; Hak pendidikan perempuan; Afghanistan.*

PENDAHULUAN

Konflik Afghanistan merupakan salah satu konflik yang berkepanjangan dan kompleks yang terjadi dalam dekade yang lama. Kondisi demikian mendorong berbagai aktor internasional untuk mendukung perdamaian Afghanistan, salah satunya Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia yang memiliki pengalaman dalam menjalankan diplomasi dalam mewujudkan perdamaian. Penelitian Fajar et al (2023) menemukan Indonesia memiliki posisi strategis untuk menyelesaikan konflik Afghanistan dengan pendekatan agama, budaya, kemanusiaan, hingga pendidikan yang memiliki potensi diterima masyarakat Afghanistan. Dalam konteks pemulihan perdamaian tersebut, instrumen pendidikan yang ditawarkan Indonesia tidak hanya sekadar menjadi alat diplomasi formal, melainkan sebuah aktualisasi dari nilai kemanusiaan yang inklusif, salah satunya melalui pemberian beasiswa terhadap perempuan-perempuan di Afghanistan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan tujuan menjamin martabat setiap individu yang seharusnya tidak memandang jenis kelamin. Sebagai kekuatan moral yang dilindungi dalam hukum, hak untuk mendapatkan pendidikan bersifat universal dan tidak dapat dihilangkan, sesuai dengan yang sudah ditegaskan pada Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Di Indonesia Prinsip ini kembali ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 45 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 yang menjamin hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan di semua jenjang. Pendidikan pada perempuan tidak untuk meningkatkan kualitas individu, namun sebagai kunci strategis untuk memberdayakan dan membangun bangsa guna menghapus ketimpangan sosial yang disebabkan oleh budaya subordinasi. Namun sayangnya, komitmen global terhadap pendidikan universal menghadapi tantangan besar di Afghanistan pasca kembalinya kekuasaan Taliban pada 15 Agustus 2021 (Salsabila & Harmiyati, 2023). Secara historis, kembalinya Taliban merupakan hasil dari dinamika panjang sejak pembentukannya pada 1994 hingga penarikan pasukan NATO dan Amerika Serikat melalui *Doha Agreement* tahun 2020. Keberhasilan mereka mendapatkan kembali kekuasaan didorong dengan faktor legitimasi internal serta interaksi diplomatik internasional yang memberikan pengakuan implisit terhadap posisi mereka dalam geopolitik kawasan (Salsabila & Harmiyati, 2023).

Implementasi kebijakan rezim baru ini memberikan dampak langsung terhadap penghentian akses pendidikan bagi perempuan secara sistematis. Larangan bersekolah di atas kelas 6 menyebabkan sekitar 2,2 juta remaja putri kehilangan akses terhadap pendidikan, dengan tambahan 397.000 anak perempuan terhalang setiap tahun terhalang setiap tahunnya. Perempuan dengan kemampuan membaca kini hanya sebesar 27%, bahkan di wilayah Kandahar dan Helmand angkanya merosot di bawah 15%. Eksklusi ini meluas hingga jenjang pendidikan tinggi dan vokasi yang mencatatkan angka partisipasi nol persen pada tahun 2024 (UNESCO & UNICEF, 2025). Hambatan pendidikan bagi perempuan di Afghanistan tidak hanya berasal dari kebijakan yang membatasi, tetapi juga dari struktur kurikulum yang padat dan kurangnya sarana sanitasi yang mendukung proses belajar. Indonesia sebagai negara demokrasi dengan salah satu populasi muslim terbesar di dunia telah berkomitmen dalam memperkuat serta memberdayakan perempuan Afghanistan. Hal ini merupakan tujuan sekaligus komitmen internasional yang sebagaimana terkandung

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada paragraf keempat alinea kedua, yaitu:

“... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...” (Mahkamah Konstitusi RI, 2002).

Dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan, kerja sama Indonesia-Afganistan telah dimulai sejak 2017, dimulai dengan kunjungan mantan Presiden Afganistan, Mohammad Ashraf Ghani, ke Indonesia yang disambut oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kerja sama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengarusutamaan serta perlindungan gender. Pada artikel ini, penelitian akan berfokus pada kerja sama Indonesia-Afganistan di bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa berjenjang karena urgensinya sebagai salah satu cara utama untuk mengatasi pembatasan hak pendidikan dan kemanusiaan yang ekstrem di bawah pemerintahan Taliban. Selain itu, beasiswa ini juga menawarkan kesempatan bagi perempuan-perempuan Afganistan untuk menempuh dan melanjutkan pendidikan formal yang diharapkan memberikan *output* dalam memberdayakan diri serta membangun masa depan yang lebih baik, baik di dalam maupun luar negeri.

Terdapat Penelitian terdahulu yang oleh Rachman dkk. (2020) yang mengkaji diplomasi Indonesia dalam memperkuat komitmen pemberdayaan perempuan Afganistan sebagai bagian dari proses perdamaian dengan menggunakan kerangka *soft power currency* yang terdiri dari tiga konsep, yaitu *beauty*, *brilliance*, dan *benignity*. Dalam penelitian tersebut, upaya Indonesia mencakup berbagai bidang kerja sama, mulai dari ekonomi, keagamaan, pendidikan, hingga konsolidasi demokrasi, termasuk diantaranya pemberian beasiswa kepada 100 mahasiswa Afganistan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi Indonesia serta program *Short Course on Introduction to Islam in Indonesia* bagi 80 pelajar perempuan Afganistan. Meskipun demikian, penelitian tersebut hanya menyebut program beasiswa secara singkat sebagai bagian dari kerangka kerja sama yang lebih luas tanpa menganalisis secara mendalam mengenai proses seleksi, mekanisme implementasi, dampak nyata, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian beasiswa khusus bagi perempuan Afganistan. Kesenjangan tersebut menjadi *research gap* dari penelitian ini, yakni belum adanya kajian yang secara spesifik dan komprehensif membahas pemberdayaan perempuan Afganistan di bidang pendidikan melalui instrumen beasiswa sebagai bagian dari diplomasi pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, *novelty* atau kebaruan penelitian ini terletak pada hadirnya analisis lanjutan yang komprehensif mengenai proses serta implementasi pemberian beasiswa tersebut. Hal ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana Indonesia memanfaatkan diplomasi pendidikan sebagai salah satu wujud nyata *soft power* dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perdamaian di Afganistan. Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimana proses dan implementasi program beasiswa yang diberikan pemerintah Indonesia kepada perempuan Afganistan dalam kapasitasnya sebagai instrumen *soft power diplomacy*?” Sejalan dengan rumusan tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif implementasi program beasiswa dimaksud sebagai bagian dari strategi diplomasi pendidikan Indonesia dalam mendukung hak belajar perempuan Afganistan.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* untuk membedah secara komprehensif implementasi program

Peran Indonesia Mewujudkan Perdamaian Afganistan: Studi
Literatur Pemberdayaan Hak Belajar Perempuan Afganistan
Melalui Pemberian Beasiswa

beasiswa Indonesia sebagai instrumen *soft power diplomacy* bagi perempuan Afganistan. Penggunaan SLR bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi literatur yang relevan guna menjawab urgensi pemberian beasiswa berjenjang sebagai solusi atas pembatasan hak pendidikan ekstrem di bawah rezim Taliban. Tahapan penelitian diawali dengan pengumpulan artikel jurnal ilmiah melalui sumber yang kredibel seperti Google Scholar dengan memprioritaskan artikel jurnal dibandingkan buku untuk mendapatkan data yang lebih mutakhir terkait dinamika geopolitik pasca penarikan pasukan NATO dan AS. Pencarian data difokuskan pada kata kunci strategis seperti "Diplomasi Pendidikan", "Pemberdayaan Perempuan Afganistan", dan "Soft Power Indonesia". Langkah ini dilakukan untuk mengatasi *research gap* yang ada, di mana penelitian terdahulu belum banyak membahas secara spesifik mengenai mekanisme implementasi dan dampak nyata instrumen beasiswa dalam diplomasi pendidikan Indonesia.

Secara operasional, penelitian ini melakukan analisis terhadap berbagai studi kasus dan data yang ditemukan dalam jurnal-jurnal terpilih untuk melihat konsistensi antara mandat konstitusi Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan langkah diplomasi nyata di kancah internasional (Siyoto & Sodik, 2015). Kriteria inklusi dalam tinjauan pustaka sistematis ini mencakup literatur yang membahas kerja sama Indonesia-Afganistan yang telah dirintis sejak 2017, terutama yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan perlindungan hak pendidikan perempuan. Data yang telah direduksi kemudian disintesis untuk menggambarkan bagaimana program beasiswa ini tidak sekadar menjadi bantuan akademik, melainkan manifestasi nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan gender yang diusung Indonesia. Sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, pernyataan dari para ahli, pejabat publik, serta rincian teknis mengenai restriksi regulasi di Afganistan akan dipaparkan secara mendalam pada bagian pembahasan guna memperkuat analisis mengenai efektivitas diplomasi pendidikan sebagai sarana persuasi yang organik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Indonesia dalam memperjuangkan hak belajar perempuan Afganistan berakar kuat pada landasan teologis Islam *Rahmatan lil-Alamin* yang menempatkan Islam sebagai agama yang secara inheren membawa misi kasih sayang, rahmat, serta kesejahteraan bagi seluruh alam tanpa terkecuali. Nilai ini secara tegas menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan merupakan hak fundamental yang tidak dapat dibatasi atas dasar diskriminasi gender (Nasution & Prandana, 2025; Wulandari et al., 2025). Argumentasi teologis ini semakin dikuatkan oleh kajian hadis yang menunjukkan bahwa larangan pendidikan bagi perempuan tidak memiliki basis yang sah dalam tradisi keilmuan Islam sebagaimana ditunjukkan dalam tinjauan terhadap Hadis al-Bukhari Nomor Indeks 7310 yang justru mengandung prinsip kesetaraan dalam akses ilmu pengetahuan (Billah et al., 2024). Dalam kerangka inilah, pemberian beasiswa oleh Indonesia dikonstruksi bukan hanya sekedar bantuan akademik, melainkan menjadi instrumen *soft power* yang memiliki legitimasi moral tinggi karena bersumber dari kesamaan identitas keagamaan antara Indonesia-Afganistan. Sebanyak 12 artikel yang diperoleh dinilai sesuai dengan pokok bahasan serta kriteria dari tinjauan literatur. Berikutnya, masing-masing artikel tersebut dilakukan *review* (Tabel 1).

Tabel 1. Hasil Studi Literatur

No	Penulis	Judul	Desain	Responden	Prosedur Penelitian	Hasil
1.	Aman, A., & Satria, R. (2025)	Religion and Public Diplomacy: The Role of Nahdlatul Ulama (NU) in Indonesia - Afganistan Peace Agenda	Deskriptif Kualitatif (Studi Kasus/ Analisis Kebijakan)	Aktor-aktor kunci di Nahdlatul Ulama (NU) dan pihak-pihak terkait dalam diplomasi Indonesia-Afganistan.	Analisis peran strategis organisasi keagamaan (NU) sebagai aktor non-negara melalui jaringan keagamaan internasional.	NU berperan sebagai instrumen penting dalam diplomasi publik Indonesia untuk memperkuat hubungan dan mendukung agenda perdamaian di Afganistan melalui jalur agama.
2..	Lestari, D., & Putri, A. (2025)	Peran Women's International League For Peace And Freedom (WILPF) dalam Pemberdayaan Perempuan Afganistan	Kualitatif Deskriptif	Aktivis WILPF dan perwakilan organisasi perempuan di Afganistan.	Analisis dokumen laporan WILPF dan studi literatur mengenai program advokasi serta pemberdayaan perempuan di zona konflik.	WILPF berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak sipil perempuan Afganistan di tingkat internasional serta menyediakan platform advokasi untuk keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian.
3.	Nasution, N., & Prandana, T. (2025)	Mewujudkan Islam Rahmatan Lil'Alamin	Deskriptif Kualitatif (Studi Pustaka/ Normatif)	Tidak menggunakan responden (Analisis konseptual dan teks keagamaan).	Tinjauan literatur mengenai implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan global untuk menciptakan perdamaian.	Menjelaskan bahwa perwujudan Islam Rahmatan Lil'Alamin dilakukan melalui sikap moderasi, toleransi, dan aksi kemanusiaan yang inklusif untuk memberikan manfaat bagi semesta alam.
4.	Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015)	Dasar Metodologi Penelitian	Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif (Korelasi,	Tidak menggunakan responden (buku referensi metodologi)	Studi pustaka dan tinjauan literatur mengenai prosedur	Buku ini menjelaskan bahwa validitas, reliabilitas, dan instrumen yang tepat adalah kunci dalam

Peran Indonesia Mewujudkan Perdamaian Afganistan: Studi Literatur Pemberdayaan Hak Belajar Perempuan Afganistan Melalui Pemberian Beasiswa

No	Penulis	Judul	Desain	Responden	Prosedur Penelitian	Hasil
			Eksperimen).		penelitian ilmiah.	keberhasilan pengumpulan data penelitian kuantitatif maupun kualitatif.
5.	Sulistiar a, W. R. (2024)	Strategi Indonesia Dalam Membantu Pemenuhan Hak Pendidikan Tinggi Bagi Perempuan Afganistan Era Taliban	Deskriptif Kualitatif	Dokumen kebijakan luar negeri Indonesia dan pernyataan resmi Kemlu RI.	Analisis data sekunder melalui studi pustaka dan dokumen terkait bantuan kemanusiaan serta beasiswa pendidikan .	Indonesia menggunakan strategi diplomasi lunak (<i>soft power</i>) melalui pemberian beasiswa dan pelatihan kapasitas untuk memastikan perempuan Afganistan tetap mendapatkan akses pendidikan tinggi di tengah pembatasan oleh rezim Taliban.
6.	Wulandari, P., dkk. (2025)	Islam dan Pendidikan: Islam sebagai Agama Rahmatan lil Alamin dan Pandangan Islam terhadap Pendidikan	Deskriptif Kualitatif (Studi Literatur/ Normatif)	Tidak menggunakan responden (Analisis teks keagamaan dan literatur pendidikan).	Tinjauan pustaka dan analisis tematik terhadap konsep Islam Rahmatan lil Alamin dalam sistem pendidikan Islam.	Menunjukkan bahwa Islam memandang pendidikan sebagai kewajiban universal yang harus inklusif dan membawa maslahat bagi seluruh alam (Rahmatan lil Alamin), tanpa memandang gender atau latar belakang.
7.	Arifi Saiman, dkk. (2021)	Diplomasi Indonesia Dalam Memperkuat Komitmen Pemberdayaan Perempuan Untuk Mendukung Proses Perdamaian	Deskriptif Kualitatif	Perwakilan Pemerintah Indonesia (Kemlu RI) dan Aktor Diplomatik.	Analisis kebijakan luar negeri Indonesia melalui studi literatur dan observasi terhadap forum internasional seperti Indonesia-	Diplomasi Indonesia berhasil memposisikan isu perempuan sebagai elemen sentral dalam perdamaian Afganistan melalui berbagai pengalaman (<i>sharing best practices</i>) mengenai peran moderasi Islam

No	Penulis	Judul	Desain	Responden	Prosedur Penelitian	Hasil
		n Afganistan			Afganistan Women's Network.	dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
8.	Desfi Indah Salsabila & Dra. Harmiyati, M.Si. (2023)	Latar Belakang Berkuasanya Kembali Taliban di Afganistan pada Tahun 2021.	Deskriptif Kualitatif.	Kelompok Taliban, Pemerintah Amerika Serikat (dan sekutu NATO), masyarakat suku Pashtun, serta aktor internasional terkait seperti Pakistan dan China.	Menganalisis faktor-faktor penyebab kembalinya kekuasaan Taliban menggunakan kerangka Teori Legitimasi (Max Weber) dan Teori Konstruktivisme (Alexander Wendt)	Taliban berhasil berkuasa kembali karena memiliki Legitimasi Tradisional dari masyarakat lokal (suku Pashtun) dan perubahan konstruksi identitas oleh Amerika Serikat (melalui Perjanjian Doha) yang mengubah posisi Taliban dari kelompok teroris menjadi aktor politik yang diakui secara implisit.
9.	Ahmad Syauqi (2021)	Soft Power Indonesia di Dunia Muslim melalui Pendidikan dan Kebudayaan	Deskriptif Kualitatif	Studi kebijakan kualitatif, tidak ada "responden" dalam bentuk sampel statistik.	Menganalisis tantangan citra dunia Muslim yang sering diasosiasikan dengan konflik dan bagaimana Indonesia mengambil posisi unik.	Strategi <i>soft power</i> melalui jalur pendidikan memiliki dampak jangka panjang (long-term investment) dibandingkan diplomasi politik formal yang bersifat transaksional.
10.	Fajar, dkk. (2023)	Indonesia's Role in Conflict Resolution in Afganistan Through Soft Power	Kualitatif Deskriptif Analisis	Tidak menggunakan responden manusia. Sumber data sepenuhnya adalah data dokumenter atau studi pustaka.	Menganalisis data dokumenter seperti buku, regulasi, catatan rapat, dan fakta sejarah terkait keterlibatan diplomasi Indonesia.	Indonesia berhasil menjalankan peran sebagai mediator dalam konflik Afganistan melalui strategi <i>soft power</i> yang memanfaatkan pendekatan budaya dan kesamaan identitas agama.

Berdasarkan sintesis literatur yang telah ditinjau, tergambar secara konsisten bahwa strategi utama yang dilakukan oleh Indonesia melalui diplomasi pendidikan diwujudkan melalui program beasiswa berjenjang bagi perempuan Afganistan. Melalui program beasiswa ini, perempuan Afganistan tidak hanya memperoleh akses terhadap ilmu pengetahuan akademik, tetapi juga mengalami secara langsung praktik kehidupan sosial di Indonesia yang moderat, inklusif, dan demokratis. Pengalaman hidup di lingkungan masyarakat muslim yang plural ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi untuk membuktikan bahwa kesetaraan gender dan pendidikan perempuan sepenuhnya kompatibel dengan nilai-nilai dalam islam (Syauqi, 2021; Sulistiara, 2024). Secara lebih spesifik, program beasiswa ini bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menjadi medium internalisasi konsep Islam Wasathiyah sebagaimana dirumuskan dalam Peta Jalan Moderasi Beragama Global yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI (2023).. Melalui interaksi langsung dengan ekosistem akademik dan sosial di Indonesia, para penerima beasiswa diharapkan dapat menginternalisasi paradigma *Hifdz al-Aql* (penjagaan akal) sebagai pilar *Maqasid al-Shari'ah* yang memandang pengembangan intelektualitas perempuan bukan hanya sebagai ancaman budaya, melainkan sebagai kewajiban teologis demi menjaga keberlangsungan dan martabat umat (Wulandari et al., 2025; Nasution & Prandana, 2025). Dimensi inilah yang menjadi pembeda antara pendekatan Indonesia dari tekanan hak asasi manusia dengan basis barat, bahwa Indonesia menawarkan argumen dari dalam bangunan teologi islam itu sendiri.

Tabel 2. Pemberian Beasiswa Kepada Perempuan Afganistan

No	Program dan Universitas	Estimasi Alokasi/Persentase	Keterangan Program	Sumber
1.	Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)	Tidak ada persentase tetap	Dikelola oleh Kemendikbudristek, program ini menempatkan Afganistan sebagai negara prioritas.	Laman resmi Beasiswa KNB Kemendikbudristek.
2.	Indonesian AID Scholarship (TIAS)	Per Universitas mitra 2-5 orang/tahun	Melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), Indonesia memberikan bantuan teknis yang ditargetkan.	Laporan Tahunan LDKPI (Indonesian AID).
3.	UIII (Universitas Islam Internasional Indonesia)	10-15% dari total kuota asing	UIII memberikan beasiswa penuh melalui program <i>International Student Fellowship</i> dengan kebijakan prioritas bagi perempuan Afganistan.	Laporan Tahunan UIII dan Data Mahasiswa Asing UIII 2024/2025.

No	Program dan Universitas	Estimasi Alokasi/Persentase	Keterangan Program	Sumber
4.	UNEJ (Universitas Jember)	20 kursi beasiswa (kuota tetap)	Melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI. Mencakup pembebasan Biaya Kuliah Tunggal (UKT) dan penyediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswi untuk jenjang S1, S2, hingga S3.	Siaran Pers Universitas Jember dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI.
5.	UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)	Kuota Dinamis	UMY aktif memberikan beasiswa melalui skema <i>International Students Scholarship</i> yang disalurkan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI.	Laman resmi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Berita Kemlu RI.

Indonesia mengimplementasikan diplomasi pendidikan melalui pemberian beasiswa berjenjang bagi perempuan Afganistan dengan memanfaatkan jalur utama secara simultan, yaitu jalur pemerintahan (*Government-to-Government*) dan kemitraan antar-lembaga. Pada jalur pemerintah, program Beasiswa KNB yang dikelola Kemendikbudristek dan Indonesian AID (TIAS) melalui LDKPI menempatkan Afganistan sebagai negara prioritas, yang secara strategis berfungsi untuk menembus hambatan regulasi rezim Taliban yang menutup akses pendidikan pelajar perempuan dalam negeri. Pada jalur institusi, universitas- universitas seperti UII, UNEJ, dan UMY memiliki posisi sebagai pelaksana lapangan yang menyediakan kuota khusus serta fasilitas pembebasan biaya pendidikan (UKT) bagi mahasiswi Afganistan dari jenjang S1 hingga S3 sebagai bentuk dukungan terhadap hak pendidikan tinggi. Ketiga institusi tersebut bukan dipilih secara acak, UII relevan karena identitasnya sebagai universitas Islam internasional yang secara eksplisit memprioritaskan perempuan Afganistan dalam skema *International Student Fellowship*, sementara UMY dan UNEJ memperkuat legitimasi Islam moderat melalui jaringan Muhammadiyah dan koordinasi langsung dengan Kementerian Luar Negeri RI. Melalui proses ini, beasiswa tidak semata-mata hanya berfungsi sebagai bantuan akademik, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun kapasitas sumber daya manusia perempuan Afganistan agar dapat berdaya di lingkungan mereka.

Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa implementasi diplomasi *soft power* Indonesia melalui strategi spesifik berupa program beasiswa pendidikan, dialog keagamaan dan keterlibatan di forum multilateral berjalan secara sistematis dan berlapis. Mengacu pada kerangka *soft power* Joseph Nye, efektivitas diplomasi ini terletak pada kemampuan Indonesia mengubah daya tarik nilai domestiknya menjadi pengaruh nyata

di luar negeri tanpa adanya paksaan. Dalam konteks ini, program beasiswa terbukti mampu menjangkau individu-individu perempuan Afganistan yang secara langsung mendapatkan akses pendidikan tinggi yang tidak didapatkan di negara asalnya. Implementasi ini menghasilkan dampak nyata pada level individu, dampaknya konkret dan terukur. Kedua, dari sisi level sosial yang dapat dilihat dari menguatnya legitimasi pendidikan perempuan dalam kerangka Islam. Ketiga, dari sisi level global dengan peningkatan posisi Indonesia dalam diplomasi pendidikan internasional sebagai negara muslim moderat. Pada level global ini, Indonesia tidak berdiri sendiri. Upaya serupa juga dilakukan oleh UNESCO melalui berbagai strategi untuk mempertahankan hak akses pendidikan perempuan di Afganistan pasca kembalinya Taliban, yang menegaskan bahwa tekanan normatif internasional dari berbagai aktor multidimensional tetap diperlukan sebagai pelengkap diplomasi bilateral (Desviando, 2025).

Para penerima beasiswa memperoleh peningkatan kapasitas akademik dan kesadaran kritis yang memperluas cakrawala mereka, serta pada level sosial melalui terbentuknya aktor perubahan yang membawa nilai moderasi Islam ke lingkungan mereka. Namun, terdapat ketegangan analitis yang perlu diperhatikan, dampak pada level individu belum dapat secara otomatis di transfer menjadi perubahan struktural pada kebijakan domestik Taliban. Rezim Taliban membangun legitimasinya di atas konstruksi identitas yang tentunya tidak akan mudah untuk dinegosiasikan dari luar (Salsabila & Harmiyati, 2023). Hal ini diperparah oleh fakta bahwa kebijakan Taliban secara langsung menghambat pencapaian tujuan SDGs 2030, khususnya pada aspek kesetaraan gender dan pendidikan inklusif yang menjadi target global yang belum terpenuhi di Afganistan (Salsabila & Rifai, 2025). Oleh karena itu, anggapan para penerima beasiswa akan menjadi "agen perubahan" sesampainya kembali ke Afganistan perlu dihadapkan pada realitas bahwa mereka beroperasi di lingkungan yang secara sistemik menekan kapasitas tersebut.

Meski demikian, pendekatan berbasis kesamaan nilai keagamaan yang dilakukan Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan tekanan eksternal konvensional, karena mampu masuk melalui kesamaan identitas dan pendekatan non-konfrontatif. Sebagaimana argumen dari Syauqi (2021) yang mengatakan bahwa investasi melalui jalur pendidikan menghasilkan pengaruh jangka panjang (*long-term investment*) yang jauh melampaui diplomasi politik formal yang bersifat transaksional. Argumen keagamaan yang berusaha dibangun Indonesia melalui nilai Islam Wasathiyah dan paradigma *Maqasid al-Shari'ah* memiliki daya terobosan yang lebih organik karena beroperasi dalam sistem referensi yang sama dengan yang digunakan oleh rezim Taliban. Pendekatan non-konfrontatif ini yang memungkinkan Indonesia mempertahankan akses diplomatik ke Afganistan.

Keterlibatan aktor non-negara seperti Nahdlatul Ulama di dalam agenda perdamaian Afganistan (Aman & Satria, 2025) memperluas jangkauan pengaruh Indonesia hingga melampaui batas-batas diplomasi formal antarpemerintah. Sejalan dengan itu, organisasi internasional seperti *Women's International League for Peace and Freedom* (WILPF) juga berperan sebagai platform advokasi yang memperkuat suara perempuan Afganistan di tingkat global, yang menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di kawasan konflik membutuhkan kolaborasi lintas aktor, baik negara maupun non-negara (Adam et al., 2022). Oleh karena itu, meskipun program beasiswa belum mampu mendorong perubahan kebijakan struktural Taliban dalam waktu dekat ini, setidaknya strategi ini mampu membangun fondasi legitimasi moral dan jaringan

pengaruh yang dapat menjadi modal diplomatik Indonesia yang semakin signifikan dalam waktu jangka panjang, terkhusus apabila terjadi situasi politik Afghanistan mengalami pergeseran di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi program beasiswa bagi perempuan Afghanistan adalah instrumen *soft power* yang konkret melalui pemanfaatan nilai Islam Rahmatan lil-Alamin dan legitimasi moral sebagai negara Muslim yang demokratis. Strategi ini diwujudkan melalui pemberian beasiswa berjenjang seperti beasiswa KNB dan Indonesia AIDS (TIAS) dimana Afghanistan ditetapkan sebagai negara prioritas yang melibatkan skema *Government to Government* (G2G). Secara teknis, implementasi ini melibatkan universitas-universitas di Indonesia seperti UII, UNEJ dan UMY sebagai pelaksana lapangan yang menyediakan kuota khusus, pembebasan biaya pendidikan (UKT), dan fasilitas penunjang bagi mahasiswa Afghanistan. Program ini berfungsi sebagai instrumen *soft power* yang efektif karena memberikan ruang bagi perempuan Afghanistan untuk memperoleh kapasitas akademik dan kesadaran kritis di tengah pembatasan pendidikan ekstrem di negara asalnya, sekaligus membangun citra positif Indonesia di kancah internasional.

Pemerintah perlu menyadari bahwa meskipun program beasiswa ini memberikan dampak nyata pada level individu, dampaknya terhadap perubahan kebijakan struktural di Afghanistan masih bersifat jangka panjang (*long-term impact*) karena adanya hambatan regulasi domestik rezim Taliban. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk mengevaluasi cakupan beasiswa agar tidak hanya berfokus pada kuota akademik, tetapi juga pada jaminan keamanan dan keberlanjutan karier para lulusan saat kembali ke wilayah konflik. Selain itu, Indonesia harus mengoptimalkan peran aktor non-negara dan mediasi aktif di forum multilateral seperti OKI untuk memastikan bahwa bantuan teknis ini diikuti dengan negosiasi norma yang lebih kuat, sehingga akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan tidak hanya bergantung pada bantuan luar negeri, melainkan kembali menjadi hak dasar yang diakui secara lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M. D. A., Nababan, F. A., Yusuf, M., & Abror, M. Y. Y. (2022). Peran Women's International League for Peace and Freedom dalam Pemberdayaan Perempuan Afghanistan. *Jurnal Transformasi Global*, Vol, 9(1). <https://doi.org/10.21776/ub.itg.009.01.5>
- Aman, A., & Satria, R. (2025). *Religion and Public Diplomacy: The Role of Nahdlatul Ulama (NU) in Indonesia - Afghanistan Peace Agenda*. *Journal of Islamic World and Politics*, 9(1).
- Billah, R., Nurita, A., & Muhid, M. (2024). Larangan Pendidikan Formal bagi Kaum Perempuan di Afghanistan: Tinjauan Hadis al-Bukhari Nomor Indeks 7310 tentang Kesetaraan Gender. *Al-Hasyimi-Jurnal Ilmu Hadis*, 1(1), 45-70. <https://doi.org/10.63398/jih.v1i1.6>
- DESVIANDO, R. T. (2025). *STRATEGI UNESCO MEMPERTAHANKAN HAK AKSES PENDIDIKAN PEREMPUAN DI AFGHANISTAN PASCA TALIBAN KEMBALI BERKUASA PADA TAHUN 2021* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/56245/>

- Fajar, Rachman, A., & Halkis, M. (2023). Indonesia's Role In Conflict Resolution In Afghanistan Through Soft Power. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 5(2), 304–313. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v5i2.218>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2023). Laporan Tahunan: Diplomasi Indonesia di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Terkait Isu Afganistan.
- Lestari, D., & Putri, A. (2025). *Peran Women's International League For Peace And Freedom (WILPF) dalam Pemberdayaan Perempuan Afganistan*. ResearchGate: Global Feminist Studies.
- Marsudi, R. L. P. (2024). Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024: Diplomasi Indonesia untuk Kemanusiaan dan Kesetaraan. Jakarta: Kemlu RI.
- MD, A. R., Aulia, M., Abdulrab, N., Purwadi, Y., Fajar, M. D., & Ayunda, A. A. S. D. (2021). DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEMPERKUAT KOMITMEN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK MENDUKUNG PROSES PERDAMAIAN Afganistan. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(2), 259–276. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i2.4422.259-276>
- Nasution, N., & Prandana, T. (2025). *MEWUJUDKAN ISLAM RAHMATAN LIL'ALAMIN*.
- Rachman, A., Aulia, M., Abdulrab, N., Purwadi, Y., Fajar, M. D., & Ayunda, A. D. (2020). Diplomasi Indonesia dalam Memperkuat Komitmen Pemberdayaan Perempuan untuk Mendukung Proses Perdamaian Afghanistan. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(2), 259-276. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i2.4422.259-276>
- Salsabila, D. I. & Harmiyati (2023). Latar belakang berkuasanya kembali Taliban di Afghanistan pada tahun 2021. *Jurnal Pena Wimaya*, 3(2). <https://doi.org/10.31315/jpw.v3i2.10218>
- Salsabila, S., & Rifai, M. (2025). Pengaruh Pemerintahan Taliban Terhadap Pencapaian Tujuan Sdgs 2030 Bagi Perempuan Di Afganistan. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 10(1), 32-51. <https://doi.org/10.35706/jpi.v10i1.13263>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*, Muhammad Ali Sodik (1 ed.). Yogyakarta: Literasi Media Publishing. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=QPhFDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=metode+analisis+data+ebook+pdf&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiO2uSVztLsAhVT9XM BHcoCAAdcQ6AEwBHoECAIQAg#v=onepage&q&f=false>
- Sulistiara, W. R. (2024). *Strategi Indonesia Dalam Membantu Pemenuhan Hak Pendidikan Tinggi Bagi Perempuan Afganistan Era Taliban*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Syauqi, A. (2021). Soft Power Indonesia di Dunia Muslim melalui Pendidikan dan Kebudayaan. *Jurnal Diplomasi dan Hubungan Internasional*, 12(2).
- UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945. (2002).
- UNESCO & UNICEF. (2025). *Afghanistan Education Situation Report 2025*. Laporan Situasi Pendidikan.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2023, 12 Desember). *Respon situasi politik Afganistan, Kemenlu berikan beasiswa untuk kuliah di Indonesia*. <https://www.umy.ac.id/respon-situasi-politik-Afganistan-kemenlu-berikan-beasiswa-untuk-kuliah-di-indonesia/#:~:text=Respon%20Situasi%20Politik%20Afganistan%2C%20Kemenlu,Untuk%20Kuliah%20di%20Indonesia%20%2D%20UMY>

Wulandari, P., Suardi, A., Muhammad, A., & Iskhak, F. (2025). *Islam dan Pendidikan: Islam sebagai Agama Rahmatan lil Alamin dan Pandangan Islam terhadap Pendidikan (Islam and Education: Islam as a Rahmatan lil Alamin Religion and Islamic Views on Education)*. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>